

# BAB I

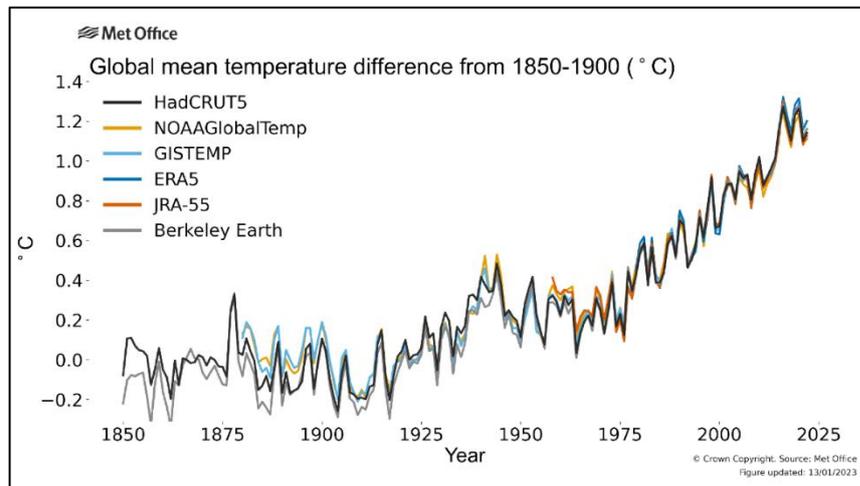
## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan permasalahan lingkungan yang telah menjadi ancaman serius bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Haryanto & Prahara (2019), bahwa permasalahan terkait dengan *climate change* (perubahan iklim) telah menjadi masalah dunia yang akan memberikan dampak pada kehidupan manusia. Hal ini disebabkan perubahan iklim tidak hanya terjadi dan dialami oleh satu atau dua negara saja melainkan terjadi dalam skala global termasuk Indonesia (Ainurrohmah & Sudarti, 2022). Perubahan iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan memiliki dampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia.

Menurut Legionosuko dkk. (2019), berdasarkan pada bukti serta dokumen laporan yang diterbitkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) telah diuraikan bahwa dunia sedang mengalami perubahan iklim, dengan kenaikan suhu sebesar kisaran  $0,8^{\circ}\text{C}$  dalam satu abad terakhir. Kondisi diperparah dengan masifnya industrialisasi yang memanfaatkan hasil bumi sebagai bahan baku dan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas emisi. Berdasarkan scenario yang telah dibuat oleh IPCC, di prediksi bahwa dengan maraknya pelepasan emisi gas, maka dalam dua dasawarsa kedepan suhu rata-rata bumi akan meningkat sekitar  $1,5^{\circ}\text{C}$  hingga  $4,4^{\circ}\text{C}$  (Calvin dkk., 2023). Badan meteorologi Inggris, telah merilis bahwa sejak tahun 1850-an, suhu rata-

rata global telah mengalami peningkatan lebih dari 1°C, hal ini dapat dilihat di gambar 1. Peningkatan suhu rata-rata bumi tersebut, apabila dibiarkan akan membawa dampak destruktif bagi kehidupan manusia dan berpengaruh terhadap ketersediaan kebutuhan pokok manusia.



Gambar 1.1 Grafik perubahan temperature bumi sejak 1850 dan prediksinya  
Sumber: <https://www.metoffice.gov.uk/>

Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah lautnya lebih luas dari pada daratan, tentunya dapat memberikan dampak terhadap pemanasan global serta perubahan iklim. Kondisi perubahan iklim yang ada di Indonesia diperparah dengan adanya kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan peningkatan penggunaan serta pemanfaatan bahan bakar fosil. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia memberikan tantangan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan Pembangunan diberbagai aspek khususnya dalam aspek ekonomi, lingkungan social dan budaya Masyarakat, hingga pertahanan dan keamanan negara. Adanya peningkatan suhu rata-rata yang ada di dunia, khususnya Indonesia, telah menyebabkan berbagai permasalahan, bahkan bencana serius. Permasalahan tersebut seperti memburuknya kualitas udara,

curah hujan yang tidak stabil, kekeringan, hingga kenaikan permukaan air laut yang berdampak pada erosi, dan abrasi.

Berdasarkan dari gambar 1.2, data dari 116 stasiun pengamatan milik BMKG, suhu udara rata-rata bulan Agustus 2023 sebesar 26.7 °C. Sedangkan, suhu udara normal klimatologis untuk bulan Agustus 2023 sepanjang periode 1991-2020 di Indonesia adalah sebesar 26.2 °C (suhu normal 20.1 °C - 28.6 °C). Berdasarkan nilai-nilai tersebut, anomali suhu udara rata-rata pada bulan Agustus 2023 menunjukkan anomali positif dengan nilai sebesar 0.5 °C (BMKG, 2023). Anomali suhu udara Indonesia pada bulan Agustus 2023 ini merupakan nilai anomali tertinggi ke-3 sepanjang periode pengamatan sejak 1981. Berdasarkan data yang diambil oleh BMKG, permasalahan iklim yang dialami dunia internasional, juga tengah dihadapi oleh Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK/KLHK), membentuk unit kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) yang berfokus pada isu-isu dan permasalahan yang berkaitan dengan perubahan iklim.



Gambar 1.2 Perbandingan Suhu Rata Rata di Indonesia 1991-2020 dan 2023  
Sumber: <https://www.bmkg.go.id/>

Menurut Anugrah (2021), Kementerian LHK telah berkomitmen untuk mengembangkan dan mewujudkan Kepemimpinan Hijau Di Indonesia. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) sebagai salah satu unit kerja di dalam KLHK memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim, serta memiliki fungsi untuk menunjang peran dari KLHK dalam menangani permasalahan lingkungan, khususnya yang terkait masalah perubahan iklim. Dalam menangani perubahan iklim, pemerintah melakukan sejumlah usaha guna menurunkan dampak dari perubahan iklim, diantaranya dengan menerbitkan UU Nomor 6 Tahun 1994 yang meratifikasi UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang mengadopsi Protokol Kyoto (Septriyawati & Anisah, 2019). Oleh karena itu, direktorat ini memiliki tupoksi untuk menangani permasalahan terkait perubahan iklim khususnya dalam penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam upaya mensosialisasikan serta mengkampanyekan isu lingkungan yang ada, satuan unit kerja ini memprioritaskan pada kepentingan keberlangsungan sosial masyarakat dan pelestarian alam. Dalam menjalankan tupoksinya, Ditjen PPI telah memainkan peran sentral dan krusial dalam memperjuangkan isu-isu lingkungan terutama berkaitan dengan masalah iklim melalui jalur politik di internal lingkungan pemerintahan.

Jenis politik ini, sering dikenal dengan sebutan istilah politik hijau (*green politic*) yang secara aktif berupaya memperjuangkan lingkungan dan pelestarian alam. Paham politik ini memiliki pemahaman bahwa sebuah pembangunan tidak hanya terpaku pada ekonomi semata, melainkan sangat mempertimbangkan faktor dan aspek lingkungan dan alam sebagai salah satu landasan terhadap peningkatan pertumbuhan dan pembangunan suatu negara (Hutabarat, 2022). Patterson (2005) menjelaskan bahwa tujuan dari adanya teori politik hijau dalam lingkup kajian Hubungan Internasional adalah untuk memberikan penjelasan terhadap krisis ekologi yang dihadapi oleh umat manusia (Yusran & Asnelly, 2018). Kemudian, kajian teori ini sangat berfokus pada upaya yang terkait dengan penyelesaian krisis, sehingga menjadikan lingkungan hidup sebagai suatu hal yang perlu dan wajib untuk dijaga keberlangsungan, kelestarian dan keseimbangannya (Yusran & Asnelly, 2018). Teori ini menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, dipengaruhi oleh interaksi dengan alam sekitarnya (Salsabila, 2018).

Selain itu, dalam teori politik hijau (*green politic theory*) memberikan penekanan dalam hal kemampuan berpikir sebuah ekosentrisme dan memberikan sebuah anti tesis perlawanan terhadap pemahaman anthropometric, dengan memberikan sebuah konsep “*deep ecology*” yang memiliki dasar norma dan moral gerakan yang terkait dengan cara pandang manusia terhadap alam dan memperlakukan alam (Fauzan, 2023). Dharmatika (2014: 17) juga menjelaskan bahwa dalam paradigma terkait ekosentrisme memiliki pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari masyarakat

tumbuhan (hutan), yang mengutamakan tujuan jangka panjang dan berkelanjutan, serta mengkritik sistem ekonomi dan politik di dalam pengelolaan lingkungan alam (Ibrahim dkk., 2019). Salah satu bentuk isu lingkungan yang dalam satu dasawarsa terakhir mendapat perhatian dari banyak pihak ialah isu terkait climate change atau perubahan iklim. Menurut Pasal 1 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan bahwa definisi dari perubahan iklim ialah suatu kondisi berubahnya iklim yang diakibatkan oleh aktivitas manusia secara langsung dan tidak langsung sehingga menyebabkan komposisi di dalam atmosfer mengalami perubahan secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah dalam periode atau kurun waktu tertentu yang dapat dibandingkan (Kementerian LHK, 2020).

Kemudian, Julismin (2013) dalam (Malihah, 2022), menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan alam berperan menjadi penyumbang dari salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan iklim dan beberapa bencana. Menurut Malihah, (2022), penyebab perubahan iklim dari perubahan iklim tidak bisa lepas dari adanya kerusakan lingkungan social dan alam yang menyertai peristiwa seperti industrialisasi, dan deforestasi. Lestari, (2018) mengatakan bahwa, perkembangan isu lingkungan termasuk isu perubahan iklim yang dibawa oleh gerakan pelestarian lingkungan telah menyumbangkan pemikiran yang besar terhadap kemunculan dari gerakan politik hijau masa kini. Pembahasan yang muncul dalam setiap permasalahan terkait isu lingkungan tidak bisa dilepaskan dari pola kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

dalam berbagai bidang terutama dalam bidang pembangunan, sosial, dan ekonomi (Lestari, 2018). Hal ini menjadi salah satu aspek dari peran dan kekuatan dasar manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan karena manusia sebagai makhluk sosial dan tidak dapat menjalankan kehidupan sendiri.

Salah satu bentuk dari gerakan politik hijau dan gerakan lingkungan yang sering di galakan ialah gerakan *green campaign*. Selain itu, konsep *green campaign* merupakan suatu konsep hubungan interaksi dengan hubungan timbal balik antar individu, maupun individu dengan kelompok yang menyuarkan isu permasalahan lingkungan yang ditentukan dengan intensitas hubungan komunikasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Cahyadi (2016) konsep gerakan *green campaign* hangat diperbincangkan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia disebabkan oleh adanya kondisi kerusakan alam yang semakin parah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam kampanye hijau atau *green campaign* ialah dengan melakukan komunikasi kepada publik kepada masyarakat menggunakan media social.

Komunikasi merupakan salah satu hal terpenting untuk membangun dan memenuhi segala macam kebutuhan kegiatan manusia dalam upaya mengaktualisasi diri, baik di dalam masyarakat, maupun dalam kegiatan instansi dan organisasi serta dalam peranannya sehingga dapat memperoleh kebahagiaan, dan tujuannya (Yusuf, 2021). Salah satu bentuk dari adanya kemajuan dalam hal ilmu pengetahuan yang menyebabkan pesat dan massifnya kemajuan dan perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi ialah

adanya media sosial. Menurut Danah Boyd dan Nichole Ellison media sosial dapat diartikan sebagai layanan berbasis internet yang memungkinkan individu membangun profil publik atau semi-publik dalam sistem terbatas, mengartikulasikan daftar pengguna lain dengan siapa mereka membagikan hubungan, dan melihat daftar hubungan yang di bangun oleh orang lain dalam sistem tersebut (Gide, 2019). Hal ini tentunya telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatnya kebutuhan warga masyarakat akan sarana media komunikasi yang semakin berkembang. Menurut Yusuf (2021), dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi termutakhir seperti telepon, internet, dan sejenisnya, menyebabkan faktor ruang dan waktu tidak lagi menjadi masalah dalam melakukan komunikasi.

Pesatnya modernisasi, dan digitalisasi, serta perkembangan teknologi dan informasi dengan adanya akses internet, hal ini menjadikan perubahan dalam cara serta media dalam melakukan komunikasi, dari komunikasi konvensional menjadi modern dan serba digital (Hariyanto, 2021). Pemerintah memainkan peran yang strategis dalam perkembangan media sebagai suatu sarana komunikasi, sebab kehidupan yang ada di lingkup masyarakat modern dewasa ini semakin kompleks dan menuntut pemerintah untuk bisa mengambil peran untuk bergeser dan beradaptasi dengan menyesuaikan fungsi dari controlling ke agenda setting, negosiasi, fasilitasi, atau bahkan “brokering” terhadap solusi untuk menemukan berbagai problematika public yang semakin kompleks (Nurdin, 2019). Secara umum media sosial dapat dimanfaatkan untuk melakukan empat hal, yakni sebagai media informasi, untuk mengajak

berpartisipasi, untuk menyebarkan narasi, dan sebagai media koordinasi (Junaidi & Syaifurahman, 2022). Oleh sebab itu, ruang lingkup dari media social dapat digunakan dan dimanfaatkan baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menunjang kegiatan, aktifitas dan produktifitas harian.

Peranan media social begitu tampak terutama dalam hal gejala di dalam masyarakat dan gerakan gerakan social yang berbasis masyarakat (Hu, 2020). Dengan media social segala informasi dan pengetahuan dapat dengan mudah dibagikan sehingga pengguna media social dapat memanfaatkannya untuk mengkampanyekan perubahan, membagikan informasi penting, atau mengorganisir protes dan gerakan sosial (Sabrina, t.t.). Hal ini dapat membantu menyebarkan edukasi secara luas dan mempengaruhi pemikiran dan tindakan banyak orang. Sehingga media sosial terutama twitter dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam media edukasi, seperti berita terkini tentang perubahan iklim, energi terbarukan, mobilitas berkelanjutan, dan praktik ramah lingkungan lainnya (Asatyas, 2022). Media sosial Twitter yang di pertengahan tahun 2023 berubah nama menjadi X telah banyak menyajikan konten edukatif melalui sebuah utas ataupun trending topic. Media sosial sebagai ruang publik dapat digunakan untuk merealisasikan kebebasan berekspresi dan berpendapat untuk mendorong negara demokrasi yang partisipatif (Nasution, 2020).

Berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya telah memaparkan hasil bahwa, media sosial twitter (sekarang bernama X) memiliki pengaruh dan peranan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muharram & Butar (2022) disebutkan bahwa media sosial

dapat digunakan sebagai sarana untuk mempersuasi seseorang yang akan mengarah pada perubahan sikap dan cara pandang seseorang, hal ini sejalan dengan *Cognitive Response Theory*. Karim & Yulianita (2021), menyebutkan bahwa media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana kampanye program dan menjadi alat untuk mengkomunikasikan program agar dipahami dan dipercaya oleh publik sehingga menciptakan citra positif. Kemudian, dalam penelitian Pambudi (2017) yang membahas terkait peran media sosial terhadap wacana penginformasian green design kepada masyarakat, menyebutkan bahwa media sosial mempunyai beberapa peran, yakni untuk meningkatkan kesadaran, menginformasikan, atau merubah perilaku masyarakat; media sosial sebagai sarana edukasi; dan media sosial digunakan sebagai sarana promosi produk dengan menggunakan iklan.

Oleh sebab itu, penting dilakukan penelitian mengenai organisasi atau lembaga yang melakukan edukasi mengenai permasalahan iklim di platform media sosial Twitter (Fadli dkk., 2023). Pemerintah Indonesia melalui KLHK khususnya unit kerja Ditjen PPI melakukan sejumlah upaya guna menangani isu perubahan iklim dengan memanfaatkan keberadaan media sosial. Melalui berbagai akun resmi media sosial yang dikelola oleh Ditjen PPI KLHK, Pemerintah khususnya Ditjen PPI memberikan informasi dan edukasi yang valid kepada masyarakat terkait dengan permasalahan lingkungan hidup khususnya perubahan iklim. Ditjen PPI Kementrian LHK tercatat memiliki empat media sosial resmi, yakni Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter.

Twitter/X sebagai salah satu akun media sosial resmi Ditjen PPI dari KLHK memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh media sosial lain yang dimiliki Ditjen PPI KLHK. Melalui *official account* X @ditjenppiklhk dengan 4.935 followers, memiliki keunggulan jumlah pengikut jika dibandingkan dengan akun laman Facebook Ditjen PPI KLHK yang hanya memiliki 1,6 ribu pengikut dan subscriber di Youtube yang hanya mencapai 3,72 ribu pengikut. Selain itu, dalam perbandingan akun X dengan Instagram milik DJPPI KLHK, akun X @ditjenppiklhk tetap memiliki keunggulan dibandingkan dengan akun Instagram @ditjenppi.klhk. Sebab, meskipun Instagram memiliki pengikut sebanyak 12,2 ribu followers dan lebih banyak dari pengikut akun Twitter @ditjenppiklhk, tetapi Twitter/X memberikan keleluasaan dan kesempatan yang besar kepada masyarakat media sosial untuk berinteraksi secara lebih intens dibandingkan di Instagram yang interaksinya sangat terbatas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni, bagaimana penggunaan media social X sebagai media komunikasi pemerintah dalam isu perubahan iklim oleh akun X @ditjenppiklhk.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penggunaan media social X sebagai media komunikasi pemerintahan dalam isu perubahan iklim oleh akun X @ditjenppiklhk.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dan mampu menjadi bahan acuan dan referensi yang membantu dan mendukung pembuatan artikel penelitian di bidang yang relevan bagi peneliti selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1) Untuk mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan informasi untuk melakukan penelitian dan kajian perkuliahan mengenai penggunaan dari sosial media sebagai media dalam melakukan komunikasi pemerintah.

#### 2) Untuk pemerintah dan pengambil kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, referensi, serta memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan kebijakan terkait dengan perubahan iklim sehingga dapat memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan lingkungan khususnya terkait perubahan iklim.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Komunikasi merupakan hal penting dalam hidup manusia sebagai makhluk social dan berperan dalam kegiatan manusia seperti dalam hal aktualisasi diri, baik di masyarakat, maupun di organisasi (Yusuf, 2021). Dengan pemanfaatan dan perananan media social sebagai media komunikasi, telah terdapat sejumlah penelitian terdahulu. Diantara penelitian terdahulu tersebut ialah:

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	Evi Novianti, Aat Ruchiyat Nugraha, Lukiat Komalasari, Kokom Komariah, Diah Sri Rejeki, (2020)	Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran)	Media sosial merupakan salah satu wadah yang efektif dalam upaya menyebarkan informasi milik pemerintah. Di Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran, melalui humas sekretaris daerah Kabupaten Pangandaran telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk komunikasi, kolaborasi, dan diskusi, antar pegawai internal, eksternal, bahkan kepada publik. Di dalam artikel ini telah memaparkan bahwa keberadaan media social dapat dimanfaatkan oleh pmda (pemerintah daerah) untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan sebesar-besarnya.
2.	Yovinus, (2018)	Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung.	Sebagai sarana komunikasi publik, media social berperan dalam optimalisasi pengawasan publik terutama terkait dengan kebijakan dan implementasi pembangunan dimana setiap anggota masyarakat berhak untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam mengkritisi berbagai kebijakan publik dan implementasi pembangunan yang dianggap tidak relevan atau merugikan kepentingan dari masyarakat secara luas. Artikel ini relevan karena pemanfaatan media social untuk komunikasi publik merupakan salah satu dari implementasi E-Government.
3.	Dharlinda Suri, (2019)	Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional	Keadaan dan kondisi masyarakat yang terus berkembang menyebabkan dampak langsung bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan berskala nasional maupun daerah

			<p>harus bersifat menyeluruh yang mencakup di berbagai aspek, seperti, pembangunan SDM, kondisi lingkungan masyarakat, serta kualitas pendidikan yang dapat memberikan prediksi dan pengendalian dalam proses menggunakan media social dan media komunikasi terhadap penggunaan yang berlebihan dan tidak beretika dengan baik. Di artikel ini disebutkan bahwa perkembangan media social sebagai media komunikasi akan berdampak langsung terhadap pembangunan di suatu negara. Pemerintah perlu memberikan respon atas aspirasi Masyarakat di media social terkait dengan bijak, seksama, dan proporsional sehingga pembangunan dapat berdampak positif bagi bangsa dan negara.</p>
4.	<p>Mukhammad Fatkhullah, Iwed Mulyani, Armoni Suci Dewi, Muhammad Alhada Fuadilah Habib, Audina Reihan (2023)</p>	<p>Strategi Komunikasi dalam Mengatasi Perubahan Iklim melalui Pelibatan Masyarakat</p>	<p>Dalam artikel ini memaparkan terkait implementasi strategi komunikasi dalam meningkatkan partisipasi dari berbagai stakeholder dalam mendukung ProKlim (Program kampung iklim). Menurut paper ini, negara Indonesia masih memiliki peran yang relatif rendah dibanding negara maju, khususnya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan melakukan mitigasi perubahan iklim. Hasil penelitian ialah, ProKlim telah menempatkan pemerintah, dalam hal ini Ditjen PPI sebagai komunikator, dan masyarakat sebagai komunikan. Selain itu, strategi komunikasi yang diterapkan hanya mencakup pemberian informasi, menggugah perasaan, mengubah perilaku,</p>

			dan mewujudkan partisipasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada satu program dari Ditjen PPI yakni ProKlim.
5.	Muhammad Rizky Prawira, Septiawan Ardiputra, Andi Rahmat Hidayat, (2022)	Analisis Dampak Wacana Publik di Media Massa Dan Media Sosial Terhadap Kebijakan Publik (Sulawesi Barat)	Wacana social yang ada di paper ini memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat elit, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan publik. Situasi yang tidak berbeda dapat terlihat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dimana sebagian masyarakatnya telah mendapatkan akses terhadap internet khususnya media social, dan media massa. Meskipun begitu, pengaruh wacana publik di media sosial terlihat cukup minim dalam beberapa kasus terdahulu seperti pada implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok tahun 2015, dan Perda Rumah Bernyanyi tahun 2016. Akan tetapi, peranan pemusatan wacana di media social mendapatkan signifikansinya pada isu yang belakangan muncul. Kondisi ini jelas menandakan bahwa penetrasi teknologi internet serta media sosial yang semakin intensif dari waktu ke waktu dalam lingkup Masyarakat Sulawesi Barat memiliki dampak positif terhadap signifikansi wacana publik dalam instrumen media digital ini terhadap formulasi kebijakan publik di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
6.	Ahmad Setiadi, (2016)	Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi	Pengaruh dari media sosial, membawa dampak yang luar biasa atas akses informasi yang tersedia terhadap perilaku penggunaan media social. Media social sangat mempermudah dan

			<p>mengubah keadaan yang cukup praktis atas perilaku sosial terutama interaksi dan komunikasi social telah menjadi daya Tarik dan kebutuhan utama Masyarakat. Begitu pun dalam hal komunikasi, seperti komunikasi bisnis, komunikasi pemasaran, komunikasi politik, komunikasi pemerintahan, dan komunikasi dalam hal sistem pembelajaran juga mengalami modernisasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, jurnal ini lebih mengedepankan atas sebuah manfaat praktis dan kajian teoritis terhadap pandangan mengenai status media sosial.</p>
7.	Iqbal Yusra Karim, dan Neni Yulianita, (2021)	<p>Peran Instagram @greenarationid sebagai Media Kampanye Ramah Lingkungan</p>	<p>Hasil penelitian menyebutkan bahwa akun Instagram milik NGO bernama <i>Greenaration Foundation</i> (GF). Akun ini digunakan untuk melakukan kampanye akan isu SDGs pada poin <i>Sustainable Production and Consumption</i> yang bertujuan sebagai sarana media komunikasi dari program kepada masyarakat. Selain itu, sebagai media komunikasi, akun Instagram GF bertujuan untuk mengkolaborasi berbagai ide dari pihak eksternal dan mengkombinasikan dengan program yang dimiliki oleh GF. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa melalui akun tersebut, pengelolaan program akan semakin dioptimalkan karena banyaknya sumber informasi yang berasal dari Masyarakat luas. Pada akhirnya dari masing-masing konten yang diunggah dalam akun tersebut akan menjadi bahan evaluasi program SDGs khususnya dalam poin produksi dan konsumsi.</p>

8.	Jessica Wiguna, Novreza Malafitri, Fitria Safiratun Nabilah, dan Saifuddin Zuhri, (2022)	Optimalisasi Instagram @Siapdarling sebagai Media Komunikasi Sosial Pembangunan untuk Mengkampanyekan Generasi Muda Sadar Lingkungan	Menurunnya tingkat kepedulian terhadap isu lingkungan dari kalangan pemuda perlu untuk diperbaiki. Akun Instagram dengan nama akun @Siapdarling merupakan salah satu akun media gerakan peduli lingkungan yang digagas oleh Bakti Lingkungan Djarum Foundation. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial Instagram merupakan sarana yang tepat untuk menginformasikan gerakan kampanye kepada generasi muda. Instagram merupakan media yang paling menjangkau seluruh generasi muda sebab pesan yang hendak disampaikan terkait isu lingkungan dapat berbentuk audiovisual yang menarik.
9.	Putri Rahmadhani, dan Ira Dwi Mayang Sari, (2022)	Pengaruh Media Sosial Twitter @Greenpeace.id terhadap Sikap Peduli Lingkungan	Akun Twitter @Greenpeace.id merupakan akun milik organisasi non-profit Greenpeace Indonesia yang bertujuan untuk melakukan kampanye serta mengadvokasi isu-isu yang terkait lingkungan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini dengan uji kuantitatif, menunjukkan bahwa akun Twitter @Greenpeace.id memberikan berpengaruh positif dalam pembentukan sikap peduli lingkungan. Postingan yang ada di dalam akun @Greenpeace.id dinilai dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam membahas dan mengangkat isu lingkungan ke permukaan. Akan tetapi, hal ini lebih baik lagi apabila unggahan di dalam akun tersebut dapat mengajak masyarakat untuk turun langsung dalam upaya perbaikan lingkungan.

10.	Inda Rizky Putri, dan Ellya Pratiwi, (2022)	Aktivisme Digital dan Pemanfaatan Media Baru Sebagai Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat atas Isu Lingkungan	Penelitian ini menunjukkan bahwa kini interaksi untuk mengangkat berbagai isu lingkungan hidup dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Perkembangan media digital memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan sharing informasi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Peran media massa dapat menggantikan peran dari gerakan sosial secara langsung yaitu dengan menghubungkan orang secara media virtual. Upaya dari pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi isu lingkungan hidup yang dipraktikkan oleh Saling.id mengadopsi metode aksi kolektif dan konektif. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam pelaksanaan aksi pemberdayaan masyarakat untuk diskusi isu lingkungan dilakukan melalui media social secara online sehingga cakupan informasi yang diperoleh dan target audiens semakin luas cakupannya.
-----	---	---	---

Dengan adanya tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu seperti yang ada di dalam tabel diatas, dapat dilihat gap penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru terletak pada fokus penelitian dan studi kasus yang diambil. Penelitian terdahulu kebanyakan berfokus pada topik komunikasi secara umum yang dipadukan dengan topik media sosial. Dengan demikian, topik penelitian terkait komunikasi di lingkup pemerintahan masih sedikit. Selain itu, jika topik komunikasi pemerintah dipadukan dengan topik media sosial dan lingkungan hidup khususnya perubahan iklim belum ada peneliti yang mengangkat penelitian terkait hal tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Komunikasi Pemerintah**

Komunikasi secara epistemologi, berasal dari bahasa Latin *communicatio* atau *communico* yang artinya “sama makna”. Adapula yang mengatakan bahwa kata komunikasi berasal dari bahasa Latin *communis* yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi kata *common* yang artinya menjadikan sesuatu dalam hal pesan atau informasi (Onnong, u. Effendy, 1996: 60). Secara terminologis komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Menurut Harold Lasswell cara sederhana untuk memahami, dan mendefinisikan makna dari komunikasi secara umum adalah dengan mengetahui “siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan apa akibatnya” (Ridwan, 2013; Hariyanto, 2021). Menurut Ruben (1992:25), pendapat Lasswell ini memiliki kesamaan dengan pendapat yang dikemukakan Aristoteles dalam melihat komunikasi yang ditekankan pada 3 komponen, yakni *speaker* (komunikator), *message* (pesan) & *audience* (komunikan) meskipun memakai kata dan istilah yang berbeda (Hariyanto, 2021).

Komunikasi sebagai suatu kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, tentunya memiliki fungsi dan tujuan tertentu secara jelas. Menurut Lasswell dalam (Hariyanto, 2021), komunikasi setidaknya memiliki tiga fungsi, yakni (1) sebagai pengawas lingkungan, (2) sebagai transmisi warisan sosial, dan (3) sebagai korelas dari berbagai bagian terpisah di dalam masyarakat yang merespon isu-isu yang ada di lingkungan sekitar masyarakat. Sedangkan, menurut Robbins (1996:5) di dalam (Sedarmayanti, 2018), komunikasi memiliki empat fungsi utama, yakni:

- a. Fungsi Pengawasan;
- b. Fungsi Motivasi;
- c. Fungsi Pengungkapan emosional; dan
- d. Fungsi Informasi.

Fungsi yang disampaikan oleh Robbins (1996:5) sejalan dengan yang disampaikan oleh Padje, (2008:26) dalam (Ridwan, 2013), yakni:

- a. Fungsi Menyampaikan informasi;
- b. Fungsi Mendidik;
- c. Fungsi Menghibur; dan
- d. Fungsi Mempengaruhi.

Selain fungsi, menurut Sedarmayanti (2018), tujuan dari komunikasi telah dikemukakan oleh sejumlah pakar komunikasi yakni Berlo, Bettinghous, dan Burke. Menurut Berlo (1960:8-9), tujuan komunikasi secara umum ada 3, yaitu: untuk informatif, persuasive, dan *entertainment*. Bettinghous (1974), mengemukakan bahwa komunikasi dilakukan oleh manusia dalam rangka mempengaruhi orang lain dengan usaha mengubah keyakinan, nilai, dan sikap. Kemudian, Burke (dalam Larson, 1986), berpendapat bahwa tujuan dari dilakukannya komunikasi itu memiliki sifat yang persuasive dan spesifik terhadap pikiran, perilaku, dan sikap seseorang.

Ada berbagai jenis dan bentuk dari komunikasi, seperti komunikasi interpersonal, intrapersonal, komunikasi massa, komunikasi bisnis, komunikasi organisasi, komunikasi politik, dan komunikasi pemerintahan. Menurut Semetko dkk., (2021), komunikasi pemerintah sering kali digunakan sebatas

merujuk pada komunikasi eksekutif di tingkat atas. Padahal, komunikasi pemerintah juga dapat digunakan untuk merujuk pada lembaga/organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya di tingkat nasional, regional, maupun local (Semetko dkk., 2021). Menurut Indah (2021: 4), hubungan yang ada antara komunikasi pemerintah dengan komunikasi massa, dan komunikasi publik, dapat diartikan sebagai rangkaian upaya guna menyampaikan informasi yang ditujukan kepada khalayak ramai (Siregar, 2022). Oleh sebab itu, komunikasi pemerintah memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan dengan berbagai konsep komunikasi, seperti komunikasi massa, komunikasi publik, dan komunikasi organisasi.

Kemudian, jika dikomparasikan dengan komunikasi dalam sektor swasta, komunikasi pemerintah akan lebih kompleks jika dilihat dari aspek tujuan, kebutuhan, dan khalayak sarannya (Patrianti dkk., 2020). Dalam konteks pemerintah, komunikasi pemerintahan dapat diartikan sebagai komunikasi antar manusia yang terjadi dalam lingkup konteks organisasi pemerintahan. Menurut Hasan (2005), Sedarmayanti, (2018), dan Ismandianto dkk. (2019), komunikasi pemerintahan merupakan penyampaian gagasan, ide, dan program pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Munandar & Suherman (2016), mendefinisikan komunikasi pemerintahan sebagai Interaksi antara pemerintah dan Masyarakat, dimana pemerintah sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, dan dalam suasana tertentu bisa sebaliknya, dimana masyarakat sebagai penyampai pesan aspirasi yang berupa gagasan ataupun ide dan pemerintah berada di

posisi menerima, dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dari definisi ini, pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan, ataupun respon terhadap aspirasi atau suara masyarakat yang disesuaikan dan didasarkan pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Menurut Grunig & Hunt (1984), komunikasi yang dilakukan oleh lembaga, instansi, dan organisasi pemerintah dengan publik maupun masyarakat tidak hanya sebatas dalam hal publikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah harus mencakup keseluruhan fungsi dari manajemen komunikasi strategis yang di dalamnya telah mencakup tahap-tahap manajemen mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi (Goeritman, 2021; Siregar, 2022). Goeritman (2021) juga menambahkan bahwa keberadaan dari juru bicara yang memiliki kredibilitas tinggi akan menjadi kunci dari keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila implementasi komunikasi pemerintahan tidak bisa lepas dari komunikasi organisasi yang dijalankan oleh para aparatur birokrasi. Melalui komunikasi pemerintah, birokrat pemerintah dapat berbagi informasi, perasaan, gagasan, dan menyampaikan sikap serta responnya terhadap suatu perintah atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Keberadaan komunikasi pemerintah ini dapat membantu organisasi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada (Beach, 1975: 580). Oleh sebab itu, Silalahi (2004) mengatakan bahwa komunikasi pemerintahan memainkan peran dan fungsi penting dalam organisasi pemerintahan adalah

untuk *managing people* dan untuk *managing staff*. Dalam *managing staff*, pemerintah berperan untuk melakukan komunikasi internal organisasi dan bertujuan agar pegawai atau staf mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya dan agar eksekutif pemerintah mendapatkan informasi dari pegawai tentang hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Silalahi, 2004). Kemudian, dalam *managing people* merupakan peran pemerintah dalam komunikasi untuk melakukan komunikasi eksternal organisasi sehingga akan memberikan informasi tentang berbagai kebijakan dan peraturan kepada masyarakat, Swasta, NGO, termasuk komunitas, sekaligus mendapatkan informasi sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dan peraturan serta dampak dari kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menentukan tindak lanjut kebijakan atau peraturan yang telah diterapkan (Silalahi, 2004).

Komunikasi pemerintah sebagai salah satu cabang dari ilmu komunikasi, tentunya memiliki beberapa komponen, elemen maupun unsur yang terkandung di dalamnya. Jumlah dari komponen, elemen, serta unsur yang membentuk komunikasi ini selaras dengan model dari proses komunikasi yang dibangun dan dikemukakan oleh pakar yang terus bertambah dan berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu komunikasi. Pendapat paling sederhana dan paling awal dari unsur, elemen, dan komponen komunikasi ialah pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa unsur yang membentuk komunikasi hanya ada tiga, yakni Pembicara (komunikator), Pesan (*massage*), Pendengar (komunikan). Kemudian, menurut Lasswell komunikasi itu sendiri terdapat

lima komponen, elemen, dan unsur yang membentuk komunikasi, yakni: komunikator, pesan, media, receiver/komunikan, dan efek.

Setelah itu, komponen, unsur, dan elemen dari komunikasi terus berkembang dan memiliki variasi dari berbagai pendapat pakar komunikasi. Pendapat yang dikemukakan para pakar ini hanya memiliki banyak kesamaan dan sedikit perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang ada hanya sebatas pada penamaan atau istilah yang digunakan untuk menyebut komunikator/sumber yang menyampaikan pesan, pesan yang disampaikan, media yang digunakan, dan penerima pesan/komunikan serta penambahan sejumlah unsur komunikasi baru. Seperti Shanon dan Weaver (1949) serta Wilbur Schramm (1954) dalam (Hariyanto, 2021; dan Yusuf, 2021), menyebutkan bahwa unsur, komponen, elemen dari komunikasi ada 6, dengan menambahkan unsur pemancar, dan signal sebagai medium serta unsur gangguan atau noise. Kemudian, menurut Abidin (2016) unsur, elemen, dan komponen dari komunikasi ditambahkan dengan unsur, elemen, atau komponen *feedback*. Pendapat Abidin (2016), ini memiliki sejumlah kesamaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shanon dan Weaver (1949) serta Wilbur Schramm (1954), dengan kesamaan terletak di unsur atau komponen *decoding* dan *encoding*.

Dari berbagai macam pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli terkait dengan unsur/elemen/komponen dari komunikasi, kemudian Uchyana (1992:19) dalam (Sedarmayanti, 2018), telah menyimpulkan bahwa unsur/komponen/elemen dari komunikasi ada 9, yaitu:

- 1) Sender: disebut juga komunikator, merupakan pihak yang akan mengirimkan dan menyampaikan pesan kepada komunikan.
- 2) Encoding: proses penyandian, proses perubahan ide dan gagasan dari pesan ke dalam bentuk lambang/tulisan yang bermakna.
- 3) Message/pesan: merupakan seperangkat lambang/tulisan yang memiliki makna untuk disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.
- 4) Media: saluran komunikasi, tempat berlalunya pesan yang disampaikan.
- 5) Decoding: merupakan rangkaian proses pengawasan, dan merupakan proses menetapkan makna (menerjemahkan) pada pesan yang berupa lambang/tulisan untuk disampaikan komunikator ke komunikan
- 6) Receiver: pihak komunikan yang menerima pesan dari komunikator.
- 7) Response: tanggapan atau respon, merupakan seperangkat reaksi dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator.
- 8) Feedback: umpan balik, merupakan tanggapan serta reaksi dari komunikan yang dapat menandakan bahwa pesan telah tersampaikan dan diterima oleh komunikan.
- 9) Noise: gangguan tak terencana yang terjadi selama proses komunikasi, sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dan tidak sesuai dengan pesan yang disampaikan komunikator.

## **2. Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Pemerintah**

Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Menurut Van Dijk (2013) dan Boyd (2009), media social merupakan platform dan kumpulan perangkat lunak yang difokuskan pada eksistensi pengguna dengan memberikan fasilitas untuk beraktivitas maupun berkolaborasi serta memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain (Juditha, 2018). Sedangkan menurut Kaplan dan Haenlein (2010) memaparkan bahwa media social adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang diciptakan menggunakan ideologi serta teknologi Web 2.0, yang membolehkan pertukaran serta penciptaan konten (Wicaksono 2013; Triyana, 2018). Media sosial menggunakan mobilitas dan teknologi berbasis web untuk menciptakan media interaktif dimana individu serta komunitas dapat saling berbagi, berdiskusi, menciptakan, dan melakukan modifikasi konten. Hal ini telah memperkenalkan serta mengubah bagaimana cara berkomunikasi antar organisasi, kelompok dan individu.

Dalam Sejarah kemunculan dari Media social sendiri sejak tahun 1970-an hingga kini, telah tersedia berbagai macam jenis media social yang dapat diakses oleh khalayak umum. Media social juga telah menjadi sarana untuk melakukan berbagai macam aktifitas digital, seperti *digital marketing*, *social media endorsement*, dan *social media activism* (Cahyono, 2016). Media social

merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan berbagai bentuk media massa seperti majalah, forum internet, weblog, blog social, microblogging, wiki, video, foto, podcast, dan bookmark social (Hidaya dkk., 2019). Menurut Kaplan dan Haenlein (2010) dalam (Cahyono, 2016; dan Hidaya dkk., 2019), telah mengklasifikasikan social media menjadi enam jenis media. Klasifikasi tersebut sebagai berikut:

- 1) *Blog* dan *Microblog*: jenis media ini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengekspresikan diri melalui blog, seperti mengkritik dan curhat. Perbedaan antara blog dan *microblog* terletak pada fitur dan konten yang tersedia. Pada *microblog*, memiliki fitur dan konten yang lebih ringkas, hingga memengaruhi alur interaksinya yang jadi lebih cepat dibandingkan blog. Oleh karena itu, media social berjenis *microblog* dapat dioptimalkan sebagai *channel* untuk berinteraksi cepat dengan user lain yang disasar, hingga berbagi informasi yang penting dapat diperoleh secara ringkas dan cepat diketahui konsumen atau pengguna lain di channel terkait. Contoh dari jenis ini ialah Twitter di pertengahan tahun 2023 berganti nama menjadi X.
- 2) Proyek Kolaborasi: jenis media social ini biasanya berbentuk website yang mengizinkan pengguna untuk mengubah, mengurangi, atau menambah konten yang ada. Contoh jenis media ini adalah Wikipedia.
- 3) Konten: pengguna media social jenis ini dapat melakukan sharing konten melalui website media social baik berupa konten video, foto, e-book, dan konten media lain. Contoh dari jenis ini ialah Youtube.

- 4) *Virtual Game World*: jenis media digital ini mereplikasi lingkungan dalam bentuk 3D, dengan user/pengguna dapat memunculkan berbagai bentuk avatar dan berinteraksi melalui dunia virtual layaknya di dunia nyata. Contoh dari media social ini ialah pada game online.
- 5) *Situs Jejaring Sosial*: media social ono berbasis aplikasi yang mengizinkan pengguna untuk dapat terhubung melalui internet dengan membuat informasi pribadi, baik berupa foto atau kata-kata sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Contoh dari media social jenis ini ialah Facebook dan Instagram.
- 6) *Virtual Social World*: media social jenis ini berbentuk dunia virtual dengan pengguna dapat merasa hidup di dunia virtual. Sama halnya seperti game world, namun jenis media social ini lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan social. Contoh dari media social ini memang belum banyak dan begitu familiar di mata masyarakat, yakni second life.

Keberadaan dari media sosial telah mempengaruhi perilaku dan kegiatan di kalangan komunitas yang melakukan pertemuan secara online dengan tujuan berbagi informasi, pengetahuan serta pendapat dengan sarana media percakapan (Mandagi & Aseng, 2021). Keberadaan media sosial adalah alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam bekerja sama dan berbagi antar pengguna dengan pengguna lain serta melakukan tindakan dimana semuanya ada di luar kerangka institusi dan organisasi (Nasrullah, 2015). Media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter/X telah membantu pemerintah dan masyarakat dalam berbagi informasi terkait peristiwa atau

kejadian di lingkungan sekitar. Hal ini menjadi dasar bagi banyak pemerintah perlu memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai alat dalam implementasi *electronic government* khususnya sebagai sarana menyampaikan penyampai informasi kepada masyarakat (Furqon & dkk, 2018). Menurut Lim (2005), keberadaan media social telah menyebabkan ruang fisik, ruang siber, dan aktivitas politik pemerintahan memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak bisa dilepaskan (Galuh, 2016). Oleh sebab itu, media social di era revolusi industry 4.0 dan era disruptif seperti dewasa ini, tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari masyarakat oleh pemerintah.

Dalam kaitannya dengan pemerintah, menurut Kahne & Bowyer (2018), media social memainkan peran krusial dalam pembentukan persepsi dan opini publik karena berfungsi sebagai *friendship driven* sekaligus *interest driven* (Rahmawati & Pratiwi, 2020). Perlu diketahui bahwa, di era demokrasi menjaga tingkat persepsi, dan opini publik yang positif merupakan hal yang penting, karena dapat mempengaruhi kualitas dari penilaian kinerja pemerintah. Menurut Wahid (2016), mempertahankan opini dan persepsi publik terhadap pemerintah agar tetap positif bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan dengan instan, perlu strategi komunikasi melalui media social yang tepat berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Menurut Eom dkk. (2018), selain berkaitan dengan opini dan persepsi publik, media social juga berguna dalam meningkatkan responsivitas pemerintah serta mengefisienkan birokrasi dengan memangkas struktur birokrasi yang akan menghambat penyelesaian dari masalah publik. Oleh sebab itu, Falco & Kleinhans (2018),

memaparkan bahwa tingkat keberhasilan dari pemanfaatan sosial media di lingkungan pemerintahan dalam hal interaksi dengan masyarakat terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhinya, yakni: (1) Faktor kontekstual, (2) Faktor teknologi, dan (3) Faktor organisasi.

Kehadiran dari berbagai media social ini tentunya membawa berbagai dampak serta akibat positif maupun negative dalam pemanfaatan dan penggunaan media social bagi kehidupan manusia. Adanya dampak positif dan negative dari media social, mengisyaratkan kepada user untuk dapat menyikapi, menggunakan, dan memanfaatkan media social dengan proporsional dan bijak. Sejumlah kelebihan atau dampak positif dari keberadaan social media antara lain:

- a) Menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan
- b) Menambah kreatifitas
- c) Membuka peluang usaha/bisnis
- d) Menambah jejaring pertmenanan
- e) Mempercepat persebaran informasi

Kemudian, meskipun terdapat sisi positif yang baik, media social juga memberikan dampak negative atau dampak buruk dari penggunaannya media social. Dampak buruk ini muncul khususnya apabila tidak disikapi dengan bijak, dampak buruk tersebut antara lain:

- a) Munculnya potensi cybercrime atau kejahatan siber dan kriminalitas melalui media social.

- b) Menjadi candu, penggunaan media social yang berlebihan menyebabkan pengguna menjadi kecanduan dan sangat bergantung pada media social.
- c) Menyebabkan manajemen waktu yang buruk dan inefisien, karena media social dapat menyebabkan pengguna lalai akan waktu.

Salah satu social media yang berbasis web 2.0 yang dalam setengah dasawarsa terakhir selalu masuk top enam besar media social dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia dan digandrungi oleh Masyarakat ialah Twitter. Twitter merupakan layanan jejaring social dan microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk membaca dan mengirim pesan berbasis teks (Susanti dkk., 2022). Media social ini telah memberikan kebebasan serta keleluasaan kepada user untuk lebih interaktif dalam penggunaan dengan beragam fitur, dan konten yang bebas diakses oleh pengguna. Sejumlah fitur dan konten yang dimiliki oleh twitter, yaitu: home, profile, fitur *search*, trending topik, fitur komunitas, latest news, DM (*Direct Message*), hashtag, *retweet*, *mention*, *favorite*, *replay*, hingga *follower*, dan *following*. Melalui berbagai fitur dan konten yang dimiliki oleh Twitter memungkinkan pengguna dapat melakukan sharing dan memperoleh informasi serta pengetahuan lebih banyak secara *real time* tanpa memandang waktu, jarak, dan lokasi. Dengan sejumlah fitur dan konten yang ada, Twitter telah memainkan peran penting dan krusial sebagai fasilitator dan katalisator dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi dan komunikasi politik di kalangan masyarakat sipil (Galuh, 2016; Rahmawati & Pratiwi, 2020).

Di pertengahan tahun 2023, tepatnya 23 Juli 2023, twitter yang sebelumnya dikelola oleh Twitter Inc. telah diakuisisi dan berganti nama menjadi X dengan nama perusahaan X Corporation (Iswara & Aulia, 2023). Dewasa ini, X telah banyak dimanfaatkan sebagai sarana branding baik secara personal maupun organisasional bagi pihak yang berkepentingan baik itu para *public relation* (humas), influencer, motivator maupun pelaku usaha. Sebab, arus informasi dan berita yang tersebar melalui media social X dapat dengan mudah diketahui dan diterima oleh Masyarakat. Oleh karena itu, pengguna X perlu berhati-hati dan bijak dalam menyikapi serta memanfaatkan X, khususnya dalam membagikan dan mencari informasi serta pengetahuan.

Menurut Biro Humas Kominfo (2023), pada triwulan pertama tahun 2023, Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) telah berhasil mengidentifikasi 425 isu/berita hoaks, dan 800.000 situs penyebar hoaks di Indonesia yang tersebar di twitter/X. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat batasan karakter posting yang hanya 140 atau 280 karakter, selain itu, twitter/X dapat menjadi sumber tersebarnya hoaks dan informasi palsu, serta menjadi sumber dari adanya tindakan *cybercrime* (kejahatan siber). Lim (2005) menyebutkan bahwa keberadaan media social khususnya twitter/X dapat mengancam dan menghancurkan monopoli negara dalam hal produksi pengetahuan dan arus informasi (Galuh, 2016). Sehingga, Gao & Lee (2017) mengatakan bahwa media social twitter/X merupakan salah satu media social yang paling cocok digunakan untuk melakukan kegiatan komunikasi politik dan pemerintahan (Rahmawati & Pratiwi, 2020).

### **3. Lingkungan Hidup**

Lingkungan atau lingkungan hidup menurut KBBI dan Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 dapat didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lain (Sinapoy, 2018; Wulandari, 2016). Menurut Qisti dkk. (2021), lingkungan hidup merupakan satu kesatuan semua sumber daya, termasuk makhluk hidup yang saling berinteraksi dan mempengaruhi sehingga membentuk suatu keseimbangan yang harmonis untuk kelangsungan hidupnya. Effendi dkk., (2018), mendefinisikan lingkungan hidup sebagai sebuah komponen yang terdiri dari unsur biotik dan abiotik yang mengelilingi sebuah organisme individual/spesies, termasuk banyak yang berkontribusi pada kesejahteraannya. Menurut Daryanto dan Suprihatin (2013:31), lingkungan hidup ialah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya (Wihardjo & Rahmayanti, 2021; Wulandari, 2016). Oleh karena itu, Wihardjo & Rahmayanti (2021), menjelaskan bahwa penggunaan istilah “lingkungan” dan “lingkungan hidup” meskipun dalam pemaknaanya sama, secara harfiah istilah “lingkungan” dan “lingkungan hidup” dapat dibedakan yakni lingkungan dapat dimaknai dengan pengertian yang lebih luas dan hubungan maupun keterkaitannya dengan makhluk hidup lain khususnya manusia.

Jika dilihat dari urgensi dan posisi lingkungan hidup terhadap kehidupan manusia, maka keberadaan dan kelestarian dari lingkungan hidup perlu dijaga. Menurut Suhartini (2008), dari sejumlah tujuan adanya perlindungan, pengelolaan, serta pelestarian lingkungan hidup yang ada di dalam Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jika diringkas terdapat 6 sasaran dari kegiatan perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup (Sinapoy, 2018), yakni:

- 1) Terlindunginya NKRI dari dampak usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- 2) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki tindakan dan sikap melindungi, membina lingkungan hidup.
- 3) Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- 4) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- 6) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan dan merealisasikan ketercapaian sasaran yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diperlukan adanya kepedulian dan kesadaran bersama seluruh komponen Masyarakat untuk menanggulangi dan mencegah supaya kerusakan lingkungan hidup dapat ditanggulangi dan ditangani sehingga tidak berkembang menjadi lebih parah.

Salah satu isu lingkungan hidup ialah isu perubahan iklim merupakan salah satu isu yang hangat diperbincangkan oleh pemerhati lingkungan yang

berkaitan dengan lingkungan hidup. Sebab, kondisi iklim akan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia dan organisme lain yang hidup di muka bumi (Nugroho, (2016). Menurut Kartasapoetra (2006), iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama yang sifatnya tetap. Menurut Wirjohamidjojo & Swarinoto (2012), Iklim mengandung pengertian sebagai sebuah kebiasaan cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah, dan juga memberi pengertian bahwa iklim adalah ciri kecuacaan suatu tempat atau daerah, dan bukan cuaca rata-rata. Kemudian, menurut *World Climate Conference* (1979) dalam LAPAN (2009), iklim dapat didefinisikan sebagai sintesis kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang, yang secara statistik cukup dapat dipakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda dengan keadaan pada setiap saatnya (Soesilo, 2021). Selain itu, Gibbs (2009) juga telah mengemukakan bahwa iklim memiliki definisi berupa suatu probabilitas statistik terjadinya berbagai keadaan atmosfer di suatu wilayah selama periode waktu tertentu (Wirjohamidjojo & Swarinoto, 2012).

Iklim dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, menurut Nugroho (2016), dan Winarno dkk. (2019), iklim di dunia secara umum dibagi menjadi 2 macam, yakni iklim berdasarkan matahari, dan iklim fisis. Selain itu, terdapat pula klasifikasi iklim berdasarkan pakar klimatologi yang telah di paparkan di oleh Nugroho (2016) dalam buku “Fenomena Global, Perubahan Iklim, dan Dampaknya di Indonesia”, dan Winarno dkk. (2019) dalam buku “Klimatologi Pertanian”. Koppen (1918) dalam (Nugroho, 2016) dan (Winarno dkk., 2019), berpendapat bahwa iklim di dunia dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam,

yakni: (1) iklim hujan tropic; (2) iklim kering; (3) iklim sedang; (4) iklim lembab, dan (5) iklim dingin. Menurut Oldman dalam (Nugroho, 2016), telah mengklasifikasikan iklim berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering dalam penentuan tipe iklimnya yang dikaitkan dengan sistem pertanian di suatu daerah tertentu. Penggolongan menurut Oldman ini dikenal sebagai zona agroklimat, yang terbagi menjadi 5 zona. Menurut Junghun dalam (Winarno dkk., 2019), iklim dapat diklasifikasikan berdasarkan ketinggian suatu tempat dan jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik. Menurut Junghun iklim dibagi menjadi empat jenis, yakni (1) Iklim Panas, (2) Iklim Sedang, (3) Iklim Sejuk, dan (4) Iklim Dingin. Schmidt dan Ferguson dalam (Manik, 2014) dan (Winarno dkk., 2019), mengklasifikasikan iklim berdasarkan unsur iklim hujan, data hujan bulanan minimal sepuluh tahun dan menggunakan nilai Q. Kriteria yang dipakai dalam klasifikasi ini adalah penentuan bulan kering (BK), bulan lembab (BL), dan bulan basah (BB). Kemudian, dari perhitungan nilai Q tersebut, diperoleh delapan tipe iklim, yakni sangat basah, basah, agak basah, sedang, agak kering, kering, sangat kering, dan ekstrem.

Menurut Aldrian dkk. (2011) dan Nugroho (2016), perubahan iklim ialah perubahan pola maupun intensitas unsur iklim pada periode waktu yang dapat dibandingkan (biasanya terhadap rata-rata 30 tahun). Perubahan iklim dapat merupakan suatu perubahan dalam kondisi cuaca rata-rata atau perubahan dalam distribusi kejadian cuaca terhadap kondisi rata-ratanya (Aldrian dkk., 2011). Menurut United Nations, (t.t.), istilah perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Menurut LAPAN (2002)

definisi dari perubahan iklim ialah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu (Darlin, 2021). Darlin (2021), juga memaparkan bahwa perubahan iklim, telah memberikan banyak dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat, diantaranya meningkatnya suhu di atmosfer, tingginya curah hujan, kenaikan muka air laut, serta ancaman terhadap ketahanan pangan tetapi peningkatan emisi gas rumah kaca akan semakin mempengaruhi variabilitas iklim alami sehingga akan semakin memicu fenomena-fenomena iklim ekstrim.

Perubahan iklim disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti emisi berbagai macam gas yang dapat menahan serta menyimpan panas yang dihasilkan dari kendaraan, industry, pembakaran sampah, hingga pembangkit listrik. Emisi gas ini lah yang nantinya menyumbang peranan yang paling besar dalam memberikan efek gas rumah kaca yang menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata bumi. Nugroho (2016), menyebutkan bahwa dengan adanya perubahan iklim ini, dapat memicu perubahan yang ada di dalam sejumlah komponen iklim, seperti curah hujan, awan, tingkat evaporasi, suhu, kelembapan, serta arah dan kecepatan angin. Perubahan tersebut terjadi secara global, tetapi dampak yang ditimbulkan bervariasi di tingkat skala lokal. Selain itu, Nugroho (2016), juga memaparkan bahwa setidaknya terdapat empat indikator yang dapat dijadikan ukuran atau tolak ukur untuk menggambarkan adanya perubahan iklim baik itu secara global maupun secara local khususnya di wilayah Indonesia, yakni:

- 1) Perubahan suhu daratan: perubahan ini, dapat menggambarkan pola siang dan malam, serta menunjukkan adanya sirkulasi angin antara angin darat dan angin laut serta angin gunung dan angin lembah. Perubahan suhu meliputi 3 hal, yakni suhu rata-rata, maksimum, dan minimum, baik dalam skala harian maupun bulanan.
- 2) Peningkatan curah hujan: peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya cuaca ekstrem, seperti siklon tropis, kekeringan, banjir, berkurangnya jumlah hari hujan, serta penambahan periode hari hujan secara berturut-turut (*wet spell*).
- 3) Mundurnya musim: bencana iklim yang ekstrem dapat menyebabkan berubahnya waktu kedatangan musim dalam jangka Panjang.
- 4) Perubahan volume hujan: adanya perubahan iklim menyebabkan akumulasi curah hujan harian, bulanan, dan tahunan yang merupakan catatan iklim penting yang menunjukkan potensi kapasitas sumber daya air tercurah mengalami perubahan.

Dari keempat indicator tersebut, telah memberikan gambaran bahwa perubahan iklim di Indonesia merupakan suatu hal yang nyata dan telah memberikan dampak baik secara fisik maupun non fisik. Dalam hal dampak fisik, Indonesia pernah mengalami sejumlah fenomena dan bencana yang disebabkan karena adanya perubahan iklim, diantaranya kebakaran hutan, meningkatnya puting beliung, banjir rob, gelombang tinggi di laut, kenaikan permukaan rata-rata air lain, munculnya anomali musim, adanya perluasan wilayah tropis, serta perubahan siklus air dan frekuensi El Nino dan La Nina.

## **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah sebuah abstraksi, yang dapat diungkapkan kedalam sebuah kata-kata, serta dapat membantu pemahaman. Berikut definisi konseptual dalam penelitian ini:

### **1. Komunikasi Pemerintahan**

Sebuah rangkaian proses pengolahan, pembentukan, penyampaian, dan penerimaan, dan pesan yang terjadi di lingkungan pemerintahan dengan tujuan tertentu dan dalam rangka melaksanakan dan menjalankan tujuan, tugas, fungsi, dan peran pemerintah.

### **2. Media Sosial**

Merupakan salah satu platform online yang berkembang di era globalisasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

### **3. Lingkungan Hidup**

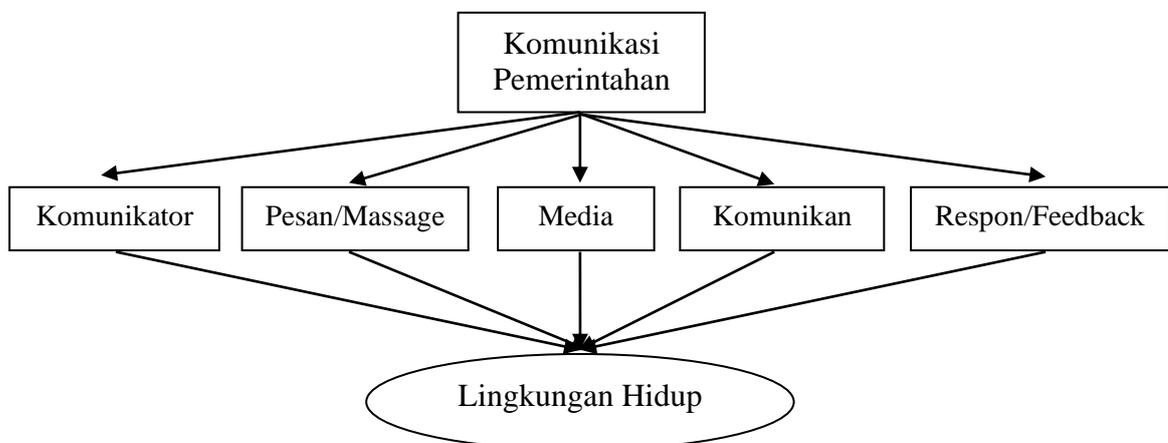
Segala sesuatu di sekitar manusia yang saling mempengaruhi, saling berinteraksi dan merupakan sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi yang terjadi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi (ekosistem). Lingkungan hidup memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi.

## H. Definisi Operasional

Tabel 1.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Komunikasi Pemerintahan	Komunikator	1. Aktor yang berperan sebagai komunikator serta peranan dan tugas dari aktor tersebut. 2. Metode dan model penyampai pesan
		Pesan/ Message	1. Ketepatan ejaan, dan kaidah bahasa yang tepat 2. Kejelasan makna/substansi pesan 3. Kesesuaian konteks pesan
		Media	1. Jenis postingan media 2. Jumlah followers 3. Jumlah postingan dan konten
		Komunikan	1. Pemahaman, tingkat kepehaman komunikan yang dilihat dari respon. 2. Status sosial, Nilai dan kepercayaan yang dianut oleh komunikan
		Respon/ Feedback	1. Tingkat Keaktifan Akun 2. Ketepatan respon yang diberikan

## I. Kerangka Berpikir



Gambar 1.3 Gambar Kerangka Berpikir

## **J. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif yang pada dasarnya umum digunakan dalam mengkaji dunia ilmu sosial dan humaniora, terutama pola dan tingkah laku manusia. Metode penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang dilakukan dalam rangka memahami fenomena sosial melalui penciptaan gambaran secara menyeluruh dan kompleks, yang disajikan dengan kata-kata, laporan yang bersumber dari informan disusun atau dibuat secara rinci, dan berlangsung dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021). Sedangkan, menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk menemukan, menyelidiki, dan mendeskripsikan karakteristik dampak social yang tidak dapat diukur, digambarkan, dan dijelaskan dengan metode kuantitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif ini didasarkan pada studi kasus akun media social X. Penggunaan pendekatan dan metode ini bertujuan untuk menguak fenomena social tertentu terkait dengan penggunaan sosial media untuk komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim yang ada di Kementriaan LHK yang berkaitan dengan isu perubahan iklim.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi dunia maya yakni sosial media Twitter yang sekarang bernama X yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berinteraksi dan bersosialisasi.

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berbagai literatur kepustakaan serta dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Menurut Marzuki (1986:15), data sekunder adalah data yang pengumpulannya tidak diusahakan sendiri oleh peneliti, namun data didapatkan dari sumber Pustaka seperti, buku, jurnal, website, brosur, dan dokumen lain yang relevan dengan topik yang dikaji (Jannah, 2018). Sumber data sekunder yang diambil pada penelitian ini diambil dari berbagai sumber pustaka dan literatur yang diperoleh melalui dokumen yang telah ada, serta media social dan website yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa konten postingan media sosial yang diambil dari 200 postingan tweets untuk mengetahui penggunaan media social X yang berasal dari timeline akun @ditjenppiklhk.

Tidak seluruh konten dan postingan yang ada didalam akun X @ditjenppiklhk akan diambil dan dijadikan data, sebab terdapat postingan yang tidak berkaitan dengan topik seperti postingan terkait hari besar nasional maupun hari besar keagamaan. Postingan tweet yang akan diambil merupakan postingan yang memiliki kesesuaian dan relevansi dengan topik yang dibahas, yakni postingan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta wewenang dari Ditjen PPI. Data postingan tweet tersebut akan diambil dari postingan dalam rentan waktu maksimal tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2023.

Data yang di dapatkan dari media social akan dilakukan proses triangulasi data dengan melakukan pencocokkan, dan pengecekan kebenaran dari suatu data ke data yang lain, seperti website, serta media social pendukung seperti Instagram, dan Facebook. Pengecekan data dimaksudkan untuk melihat apakah data, informasi yang tersedia dan diperoleh melalui X juga tersedia di platform media lain seperti website dan media sosial lain. Pengecekan data perlu dilakukan guna memvalidasi hasil dan mengurangi potensi bias yang dapat muncul dari penggunaan satu sumber (Alfansyur & Mariyani, 2020). Selain itu, penggunaan triangulasi data juga dapat digunakan untuk melakukan konsolidasi data dimana kekuatan salah satu data dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan data lainnya (Kaharuddin, 2021).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, diperlukan pengumpulan data-data yang kredibel dan relevan. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan merujuk pada fenomena yang di teliti. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun, dan menganalisis dokumen yang ada, baik dokumen tertulis maupun dokumen non-tertulis seperti, gambar, dan grafik serta data yang berasal dari dari sumber media elektronik (Nilamsari, 2014; Sapitri dkk., 2022).

## 5. Teknik Analisis Data

### a. Analisis Data

Pada penelitian ini dalam melakukan analisis data digunakan teknik deskriptif analisis. Kemudian, dalam melakukan analisis terhadap data yang didapat digunakan alat bantu berupa aplikasi khusus untuk melakukan analisis kualitatif yakni Nvivo 12 Plus. Menurut Jackson & Bazeley, (2019), dan Salahudin dkk. (2020), aplikasi Nvivo 12 Plus secara spesifik merupakan aplikasi yang memiliki basis *Qualitative Data Analysis Software* (Q-DAS). Penggunaan dari aplikasi analisis Nvivo 12 Plus dapat memberikan kemudahan dalam menggambarkan dan menarasikan data yang telah diolah (Dalkin dkk., 2021). Melalui penggunaan aplikasi Nvivo 12 Plus, akan dilakukan analisis terhadap postingan serta konten dari media sosial X yang ada di akun @ditjenppiklkh. Dalam melakukan analisis terhadap postingan serta konten yang ada di dalam akun media sosial X dengan menggunakan Nvivo 12 Plus, terdapat sejumlah tahapan proses yang perlu dilakukan. Berikut merupakan penahapan dari proses analisis data yang digunakan dalam pada penelitian ini :

- 1) *Collecting data*, pada tahapan proses ini data yang berupa postingan serta konten yang ada di sosial media akan dikumpulkan dengan merujuk pada fenomena yang diteliti yaitu Penggunaan Sosial Media Sebagai Sarana Untuk Melakukan Komunikasi Pemerintah yang Terkait Dengan Isu Perubahan Iklim dengan studi kasus pada akun media sosial X @ditjenppiklkh.

- 2) *Filtering* data, pada tahapan ini bertujuan untuk menyaring data yang masuk dari akun media sosial X Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim KLHK. Tahapan filtering data menjadi tahapan yang penting dan menentukan dalam melakukan proses analisis data.
- 3) *Coding* data, Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan dan disaring akan di lakukan proses analisis dengan menggunakan indikator tertentu yang telah ditentukan yang disebut nodes untuk di analisis dengan mengkaitkannya dengan teori yang digunakan.
- 4) *Presenting* data, pada tahapan ini data yang telah dianalisis kemudian akan diberikan narasi penjelas serta akan dikaitkan dengan teori serta dikembangkan menjadi data dengan argumentasi yang sempurna.

#### **b. Penyajian Data**

Pada penelitian ini, data yang telah didapatkan dan diolah akan disajikan dalam bentuk grafik dan/atau gambar.

#### **c. Penarikan kesimpulan**

Pada penelitian ini, setelah data empiris telah didapatkan dan diolah, maka data tersebut akan dideskripsikan serta ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Metode penarikan kesimpulan ini menarik kesimpulan dari premis/ Pernyataan khusus ke pernyataan/premis umum. Metode ini tidak hanya menggunakan aturan logika, tetapi juga menggunakan bukti empiris untuk menarik kesimpulan.